

LAPORAN PENELITIAN



DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Oleh:

Ketua : Dr. Sri Nawatmi, S.E, M.Si.
NIDN: 0627046701 – SINTA ID. 6025671

Anggota : Dr. Agung Nusantara, SE. M.Si
NIDN: 0618066401 – SINTA ID. 6025701
Dr. Agus Budi Santosa, M.Si
NIDN: 0601126701 – SINTA ID. 6025726
Sabrina Tiara Imana
Nim: 14.05.51.0092

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
JANUARI 2019

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2. Jenis Penelitian : Basic Research
3. a. Bidang Penelitian : Social Science
b. Kelompok : Economics
4. a. Tujuan Sosial Ekonomi : Economics Framework
b. Kelompok : Macroeconomics Issue
5. Ketua Pelaksana:
 - a. Nama Lengkap : Dr. Sri Nawatmi, SE, MSi.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/NIDN : 0627046701
 - d. Disiplin Ilmu : Ekonomi Makro.
 - e. Pangkat/Golongan : Pembina / IVB
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Prodi : Ekonomika dan Bisnis/Keuangan dan Perbankan
 - h. Alamat Kampus : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
 - i. Telp/Faks/E-mail : 024 8414970 / 0248441738
 - j. Alamat Rumah : Bumi Wanamukti B4/23 Semarang
 - k. Telp/Faks/E-mail : 085292293793/nawatmi@edu.unisbank.ac.id
6. Jumlah Anggota Peneliti : 2 orang
 - a. Nama Anggota I : Dr. Agung Nusantara, MSi.
(NIDN: 0618066401 – SINTA ID: 6025701)
 - b. Nama Anggota II : Dr. Agus Budi Santosa, MSi.
(NIDN: 0601126701 – SINTA ID: 6025726)
 - c. Mahasiswa yang terlibat : Sabrina Tiara Imana (NIM: 14.05.51.0092)
7. Lokasi Penelitian : Indonesia
8. Jangka waktu penelitian : 2 Juli 2018 s/d 30 Desember 2018
9. Jumlah biaya yang diusulikan : Rp 3.000.000,-



Semarang, 25 Januari 2019
Ketua Peneliti



Dr. Sri Nawatmi, SE, M.Si
NIDN: 0627046701



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dimudahkan dalam menyusun laporan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa salam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara. Jika pertumbuhan ekonomi melemah maka, penyerapan terhadap angkatan kerja juga akan melemah sehingga bisa berdampak pada meningkatnya pengangguran. Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dimana hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini membahas tentang dampak dari desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan mengetahui dampak dari desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan bisa memberikan masukan pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Harapan kami, semoga penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga pula, penelitian ini nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan kelemahan dari penelitian ini.

Terima kasih kami ucapkan pada lembaga yang telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kami di bidang penelitian. Terima kasih juga pada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semarang, Januari 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Grafik	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5

BAB II: TELAAH PUSTAKA

A. Konsep Desentralisasi	7
B. Desentralisasi Fiskal	8
C. Peran Pemerintah	9
D. Teori Pengeluaran Pemerintah	11
E. Pertumbuhan Ekonomi	13
F. Hubungan pertumbuhan Ekonomi Dan Desentralisasi Fiskal	16
G. Penelitian Sebelumnya	17

BAB III:	METODE PENELITIAN	
	A. Data dan Sumber Data	19
	B. Model Penelitian	19
	C. Definisi Operasional	20
	D. Metode Analisis	21
BAB IV:	ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Uji Model Terbaik	26
	B. Pengujian Hipotesis	28
	C. Hasil Dan Analisis	31
BAB V:	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	35
	B. Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi	18
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Chow Test	27
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Hausman Test	28
Tabel 4.3	Hasil Regresi Model Fixed Effect	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	2
----------	-------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

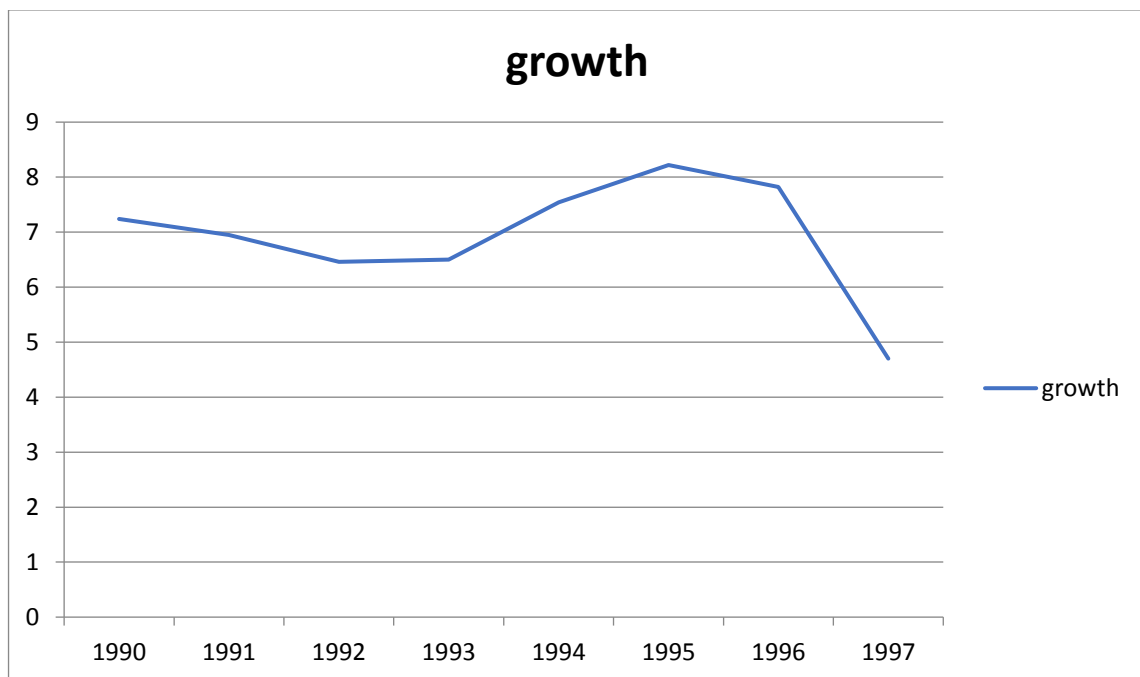
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan terjadi penurunan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Menurut Todaro dan Smith (2006), tujuan dari pembangunan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan dan penyediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi ditujukan untuk memperkuat struktur perekonomian dengan menjadikan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan dengan didukung sektor pertanian dan pertambangan yang efisien dan kegiatan jasa yang efektif. Dengan demikian, pemerintah berusaha mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan pendapatan perkapita yang diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan.

Berbagai kebijakan dirumuskan pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk mengubah sistem ekonomi dari pemerintahan yang tersentralisasi menjadi sistem yang terdesentralisasi sejak tahun 2001. Pada sistem sentralisasi, program-program dan kebijakan-kebijakan dibuat di tingkat pusat dan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia secara seragam. Hal tersebut menyebabkan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan karena antar wilayah kondisinya berbeda-beda.

Perekonomian Indonesia pada periode 1990-1996 dengan sistem sentralisasi memang mengalami pertumbuhan yang bagus, bahkan Indonesia dianggap sebagai salah satu kandidat macan Asia baru (grafik1). Akan tetapi kondisi ekonomi Indonesia memburuk setelah mengalami krisis ekonomi tahun 1997 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Krisis tersebut bermula dari krisis mata uang Bath Thailand kemudian merembet ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk hingga mencapai minus 13.13% pada tahun 1998. Terpuruknya ekonomi Indonesia disinyalir bukan hanya karena faktor krisis Thailand tetapi juga karena fundamental ekonomi Indonesia yang lemah dengan sistem sentralistiknya. Oleh karena itulah, pada tahun 2001 sistem ekonomi dan pemerintahan diubah menjadi bersifat desentralisasi.

Grafik 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Pada tahun 1968, pendapatan per kapita nasional Indonesia di kisaran US\$60, kemudian mengalami peningkatan terus menerus hingga mencapai US\$500 diakhir dekade 1980-an dan menjadi US\$ 1.023 pada tahun 1995. Setelah 16 tahun otonomi (desentralisasi) berjalan, pendapatan perkapita menjadi US\$ 3.877,74 (2017) atau menjadi lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun 1995.

Desentralisasi merupakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih rakyat, memilih kepala daerah oleh rakyat dan adanya transfer dari pemerintah pusat. Umumnya, desentralisasi mencakup aspek politik, administratif dan fiskal (Abimanyu dan Megantara, 2009). Jadi, desentralisasi diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di daerah melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif. Di sisi lain, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing (Tanzi, 2002).

Secara formal, desentralisasi mulai berlaku sejak 1 Januari 2001 dengan dibuatkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Pada aspek fiskal, desentralisasi mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal penerimaan/pendanaan. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikianrupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada, baik dari sumber penerimaan pusat maupun daerah (Bahl, 1998).

Desentralisasi fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik karena pemerintah daerah adalah institusi yang dekat dan langsung berhadapan dengan rakyat akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya (Oates, 1972). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi pada sektor publik dan memotong defisit anggaran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bird, 1993; Bahl, Linn, 1992; Gramlich, 1993 dan Oates, 1993). Hasil tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Akai dan Sakata (2002) maupun Brotaler dan Getzner (2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah akan memberikan jasa publik sesuai kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, efisiensi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah bertambah cepat. Hasil penelitian Brothaler dan Getzner (2010) serta Faridi (2011) juga mendukung temuan tersebut.

Hasil tersebut di atas ternyata bertentangan dengan hasil penelitian dari Zhang dan Zou (1998) maupun Pose dan Krojer (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun penelitian dari Nelson (1986) menunjukkan bahwa desentralisasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat.

Di masa desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan khususnya pada sektor publik. Di samping itu, pemerintah daerah seharusnya juga mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bisa terwujud. Pertumbuhan ekonomi daerah akan menurunkan tingkat kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

B. Perumusan Masalah

Pada penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa adanya desentralisasi di satu sisi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan di sisi lainnya bisa jadi justru berdampak negatif atau malah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, desentralisasi di Indonesia sudah berjalan lebih dari 17 tahun. Pertanyaannya adalah: Benarkah desentralisasi fiskal di Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

C.2. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan

- a. Mengembangkan model pertumbuhan ekonomi daerah dikaitkan dengan desentralisasi
- b. Memperkaya kajian tentang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya yang menggunakan data pooling.

2. Pengambil Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian tentang pertumbuhan ekonomi daerah dikaitkan desentralisasi diharapkan nantinya bisa teridentifikasi faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga nantinya bisa menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi merupakan studi yang penting dalam ekonomi makro. Setiap negara selalu menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga pengangguran bisa diatasi. Oleh karena itu, penelitian tentang pertumbuhan ekonomi akan selalu menarik bagi para ekonom, apalagi kalau dikaitkan dengan konsep desentralisasi.

A. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Salah satu wujud desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan ke tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, terbentuknya dewan maupun kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan berupa transfer dari pusat. Tidak mudah mendefinisikan desentralisasi karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama aspek fiskal, politik, perubahan administrasi, sistem pemerintahan dan pembangunan sosial ekonomi. Menurut Abimanyu dan Megantara (2009), desentralisasi mencakup aspek:

- a. Desentralisasi politik, pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah menyangkut aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standard dan berbagai peraturan.
- b. Desentralisasi administrasi, pemberian kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.

- c. Desentralisasi fiskal, pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin dan investasi.

B. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, jika pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka harus didukung oleh pusat berupa subsidi atau bantuan ataupun pinjaman dari pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai baik dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pada hakekatnya, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz, 2000). Fungsi distribusi artinya, pemerintah berperan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Fungsi alokasi, pemerintah menyediakan barang yang tidak disediakan oleh pasar. Fungsi stabilisasi, merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Jika pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayananan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pusat.

Menurut Halim (2007), desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika berpedoman pada:

- a. Adanya pemerintah yang kapabel dalam melaksanakan pengawasan dan *enforcement*.
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.
- c. Stabilitas politik yang kondusif

- d. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis
- e. Desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah.
- f. Kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.

C. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah suatu institusi yang dapat melakukan beberapa hal yang lebih baik dari pada swasta atau individu. Peran pemerintah dalam perekonomian:

1. Menyediakan *legal system* atau peraturan-peraturan yang tidak disediakan oleh sektor swasta.
2. Mengoreksi bila terjadi kegagalan pasar, diantaranya:
 - a. Dalam pasar yang tidak sempurna dan cenderung monopoli, harga yang terjadi biasanya lebih tinggi dan jumlah produksi lebih sedikit. Pemerintah diharapkan dapat mengatur dan memperbaiki agar kesejahteraan masyarakat tidak berkurang.
 - b. Barang publik memiliki karakteristik *non excludable* dan *non rivalry*. Hal tersebut menimbulkan fenomena *free rider* (orang akan berlomba-lomba untuk menikmati barang tersebut tanpa membayar).
 - c. Eksternalitas pasar bersifat *selfish*, yang dipikirkan hanya meminimalkan biaya sedangkan dampak secara tidak langsung, misal dampak sosial tidak diperhitungkan.
 - d. Adanya kegagalan informasi, dimana informasi tidak disediakan swasta, misal perkiraan cuaca yang dibutuhkan masyarakat baik di bidang pertanian ataupun kelautan, maka pemerintah harus menyediakan informasi cuaca.

Pada fungsi distribusi, pemerintah bertujuan menghasilkan distribusi pendapatan yang merata karena mekanisme pasar diyakini tidak akan pernah menghasilkannya. Distribusi pendapatan yang merata sangat diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa terdapat pembagian pendapatan yang lebih merata di masyarakat.

Dalam *The General Theory*, Keynes menyatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan kekuatan perpajakan dan pengeluaran untuk meningkatkan pengeluaran agregat dalam masa resesi ataupun depresi ekonomi. Pemerintah bisa mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mengacu pada perilaku pemerintah di bidang pengeluaran dan perpajakan (kebijakan di bidang anggaran). Kebijakan fiskal umumnya dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- a. Kebijakan menyangkut pembelian atas barang dan jasa
- b. Kebijakan menyangkut perpajakan
- c. Kebijakan menyangkut pembayaran transfer (kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, pembayaran kesejahteraan dan tunjangan veteran) kepada rumah tangga.

Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam hal penerimaan, instrumen utamanya adalah perpajakan. Perpajakan mempunyai dua tujuan yaitu menyediakan dana untuk kepentingan umum dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi. Tingkat pajak bisa dinaikkan untuk menurunkan permintaan apabila kondisi ekonomi kondusif dan diturunkan jika kondisi ekonomi tidak kondusif seperti adanya resesi ekonomi. Dari sisi pengeluaran, penggunaan dana yang diperoleh digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya adalah dari pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman

dari luar negeri, sedangkan pengeluaran negara meliputi pengeluaran rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan.

D. Teori Pengeluaran Pemerintah

Adanya pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah yang dimanifestasikan dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor (Mangkusubroto, 1997): (i) perubahan permintaan akan barang publik, (ii) perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, (iii) perubahan kualitas barang publik, (iv) perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

Teori perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan para ahli ekonomi dan dapat digolongkan dalam tiga golongan (Mangkusubroto, 1997):

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan maupun prasarana transportasi. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, akan tetapi pada tahap ini peran investasi swasta sudah semakin besar. Peran pemerintah tetap besar karena peran swasta yang semakin besar akan menyebabkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

b. Hukum Wagner

Menurut Wagner, jika pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat (*The Law of Expanding State Expenditure*). Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman dan Jepang). Peranan pemerintah menjadi semakin besar terutama disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan dari hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Inti teori ini adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat sekalipun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin besar. Oleh karena itu, dalam kondisi normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar. Bila kondisi tidak normal, misal perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Jika penerimaan pemerintah dari pajak meningkat dan peningkatannya terjadi karena meningkatnya tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang disebut efek pengalihan (*displacement effect*). adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Setelah perang sebenarnya pemerintah bisa menurunkan tarif pajak tetapi karena harus mengembalikan pinjaman, maka pengeluaran pemerintah meningkat (efek inspeksi/*Inspection effect*). Adanya gangguan social juga menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh swasta (*concentration effect*). Ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas

pemerintah bertambah Setelah perang selesai dan keadaan menjadi normal, maka pajak akan turun kembali. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

E. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu diharapkan oleh setiap pemerintahan yang ada karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pengangguran bisa berkurang, sehingga kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah atau tinggi rendahnya kualitas aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan melakukan investasi pada fasilitas-fasilitas penunjang seperti misal investasi infrastruktur, ekonomi dan sosial. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional menjadi faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang banyak berarti memperbesar jumlah tenaga kerja yang produktif. Jumlah tenaga kerja yang banyak berarti ukuran pasar domestik besar. Adanya kemajuan teknologi menjadi dasar berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Akumulasi modal (investasi) menjadi penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi sejak *the linier stages theory*, bahwa kunci memicu pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan adalah peningkatan total tabungan nasional dan luar negeri. Semakin banyak total tabungan dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi semakin cepat (Todaro dan Smith, 2006). Ada beberapa kritik terkait dengan teori tersebut, mereka menyatakan bahwa ada faktor-faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu kecakapan manajerial, tenaga kerja terdidik dan terlatih, kemampuan perencanaan, adanya transportasi yang memadai serta birokrasi pemerintahan yang efisien. Teori klasik yang dimotori Adam Smith, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk, menyebabkan bertambahnya output.

Ekonom klasik lainnya adalah David Ricardo, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat, maka akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah sehingga bisa mengakibatkan upah turun. Upah tersebut hanya bisa untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*stationary state*).

Teori klasik akhirnya berkembang menjadi teori Neoklasik yang dimotori Harrod Domar dan Robert Solow. Harrod Domar menganggap bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi pembentukan modal tersebut, sedangkan Solow menjelaskan tentang pertumbuhan stok kapital, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian. Ketiga variabel faktor tersebut mempengaruhi pendapatan baik nasional maupun regional.

Dalam model pertumbuhan ekonomi, stok kapital merupakan faktor penentu output sebuah perekonomian, namun stok kapital selalu berubah sehingga pada akhirnya akan

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi terkait diantaranya dengan pengeluaran pembangunan gedung atau fasilitas baru dan perlengkapan. Pengeluaran tersebut menyebabkan stok kapital meningkat. Semakin besar stok kapital, maka semakin banyak output yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Pertambahan penduduk dapat berdampak positif maupun negatif. Menurut Solow, pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Model pertumbuhan Solow merupakan pilar yang memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan Neoklasik. Model ini merupakan pengembangan dari model pertumbuhan Harrod Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Pada model pertumbuhan ekonomi Solow, tenaga kerja dan modal menggunakan asumsi *decreasing return to scale* jika dianalisis secara terpisah tetapi jika dianalisis secara bersamaan menggunakan asumsi *constant return to scale* (Todaro dan Smith, 2006).

Model pertumbuhan Neoklasik mengasumsikan mobilitas faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan kurang lancar. Pada saat itu, modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan cenderung melebar. Pada proses pembangunan selanjutnya, semakin baiknya prasarana dan komunikasi, mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Setelah negara menjadi maju, ketimpangan pembangunan akan berkurang.

Model pertumbuhan ekonomi endogen menyatakan bahwa peran kualitas tenaga kerja lebih penting dari pada kuantitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya melihat dari sisi tingkat Pendidikan tetapi juga dari sisi kesehatannya. Dalam analisis-analisis empiris, peran Pendidikan dan kesehatan menjadi variable yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian pula dengan kapital. Peran kualitas dari kapital (kemajuan

teknologi) lebih penting dari pada kuantitasnya. Begitu pula peran dari kewirausahaan, termasuk melakukan inovasi, menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

F. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Hal itu terjadi karena desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya: (1) pemerintah daerah memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan daerah itu sendiri (2) menstimulus pemerintah daerah untuk lebih kreatif, inovatif dan akuntabel terhadap daerahnya dalam upaya merespon kebutuhan masyarakat dan upaya meningkatkan kemakmuran di daerah melalui optimalisasi sumber daya yang ada secara efisien dan mengurangi pemborosan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang secara tak langsung meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, (3) adanya kebijakan desentralisasi akan ditandai dengan penyediaan infrastruktur yang secara tak langsung sensitif terhadap kondisi daerah, yang mana lebih efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi dari pada kalau kebijakan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat yang seringkali mengabaikan kondisi antar daerah yang berbeda.

Esensi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal setidaknya mempunyai tiga pertimbangan, yaitu: (1) pertumbuhan dilihat sebagai sesuatu yang objektif dari desentralisasi fiskal dan efisiensi dalam alokasi sumber daya dalam sektor publik (2) secara eksplisit pemerintah berusaha untuk mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendorong ke arah peningkatan pendapatan perkapita (3) pertumbuhan per kapita relatif lebih mudah untuk diukur dan diinterpretasikan dibanding indikator ekonomi lainnya.

F. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Akai dan Sakata (2002), Brothaler dan Getzner (2010) maupun Bahl dan Wallace (2006) menunjukkan bahwa adanya desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi hasil tersebut berlawanan dengan temuan Zhang and Zou (1998), maupun Pose dan Krojer (2009), dimana obyek penelitian di India dan hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil berbeda ditunjukkan Oates (1985) dan Nelson. Kedua peneliti menunjukkan tidak adanya hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1
Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi

No.	Peneliti (Tahun)	Sampel	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akai dan Sakata (2002)	50 negara bagian di Amerika Serikat tahun 1992 -1996	Regresi OLS	Desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi
2	Brothaler dan Getzner (2010)	Provinsi di Austria tahun 1955-2007	Garch dan Uji Kointegrasi	Desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi baik pada jangka pendek maupun jangka panjang
3	Bahl & Wallace (2006)	21 Region di Rusia tahun 1997	Regresi OLS	Desentralisasi fiskal berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah
4	Pose & Krojer (2009)	Negara-negara CEE tahun 1990-2004	Regresi OLS	Desentralisasi fiskal menghambat pertumbuhan ekonomi daerah
5	Zhang & Zou (1998)	Provinsi di China tahun 1972-1992	Regresi Least Square	Desentralisasi fiskal menghambat

			Dummy variable	pertumbuhan ekonomi daerah
6	Faridi (2011)	Provinsi di Pakistan tahun 1972-2009	Regresi OLS	Desentralisasi fiscal mengurangi ketergantungan provinsi terhadap pusat
7	Davoodi dan Zou (1998)	46 negara sedang berkembang dan negara maju 1970-1989	Pooling data	Untuk negara sedang berkembang hubungan antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi adalah negatif sedangkan kasus negara maju hubungannya adalah positif
8	Oates (1985)	48 negara bagian di US dan 43 negara sedang berkembang dan negara maju	Regresi OLS	Tidak signifikan
9	Nelson (1986)	Di Amerika Serikat	Regresi OLS	Tidak signifikan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dengan publikasi diantaranya adalah PDRB Provinsi-Provinsi Menurut Pengeluaran 2013 - 2017, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015 – 2018, Kedaan Pekerja di Indonesia, dan Potret Pendidikan Indonesia; serta data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan institusi lainnya. Data yang digunakan adalah derajat desentralisasi fiskal (total belanja provinsi, total belanja pusat, transfer pusat ke provinsi), data modal daerah, jumlah tenaga kerja yang bekerja (*labor*), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB provinsi. Data yang diambil adalah data pooling dengan periode waktu 2015-2017 untuk 34 provinsi di Indonesia.

B. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model dari studi Aisyah (2008) yaitu:

$$G = \beta_0 + \beta_1 DDF + \beta_2 \text{Modal} + \beta_3 \text{Labor} + \beta_4 \text{IPM} + \varepsilon$$

Dimana:

G : Pertumbuhan ekonomi daerah

DDF: Derajat Desentralisasi Fiskal

K : *Capital* (Modal)

L : *Labor* (angkatan kerja yang bekerja)

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

D : Derajat Desentralisasi Fiskal

β_0 : Konstanta

β_{1-4} : Koefisien

ε : *Disturbance error*

Model yang dikembangkan menggunakan derajat desentralisasi fiskal (DDF) dengan mengadopsi dari IMF (*International Monetary of Fund*) yaitu *fiscal decentralization Indicators* yang mengukur dari sisi pengeluaran. Pengukuran tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal di Indonesia yang lebih menekankan pada desentralisasi dari sisi pengeluaran. Perhitungan DDF adalah sebagai berikut:

$$DDFit = \frac{TB\ Prov\ it}{TB\ Pusat\ t - Trf\ Pusat\ ke\ Prov\ it + TB\ Prov\ it}$$

DDF it adalah derajat desentralisasi fiskal provinsi i pada tahun t; TB Prov it adalah total belanja provinsi i pada tahun t; TB Pusat adalah total belanja pusat pada tahun t; Trf Pusat Ke Provinsi it adalah transfer Pusat atau dana perimbangan ke provinsi i pada tahun t;

C. Definisi Operasional

Dari sejumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka bisa diuraikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi: jumlah output yang dihasilkan suatu perekonomian (PDRB dalam milyar rupiah)
2. Modal : seluruh penambahan modal yang dilakukan oleh sector pemerintah dan non pemerintah (pembentukan modal tetap bruto dalam milyar rupiah)
3. *Labor* adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja (orang)
4. DDF adalah derajat desentralisasi fiskal

5. IPM adalah indeks pembangunan manusia yang pengukurannya meliputi umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

D. Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan data panel. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu yang menggabungkan antara data *cross section* dan *time series*. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*; model yang mengabaikan variabel yang relevan. Pada analisis *cross-section* tidak memperhitungkan efek perkembangan teknologi yang terjadi dalam satu waktu estimasi sehingga estimasi efek kenaikan modal fisik pada laba bisa jadi tidak akurat. Dengan data panel, adanya data *time series* bisa mengakomodir efek perbaikan teknologi pada laba perusahaan, sehingga masalah *omitted-variable* dapat dihilangkan.

Data panel berguna juga untuk alasan teknis-pragmatis, yaitu terkait dengan ketersediaan data. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, maka akan mampu menambah jumlah observasi secara signifikan tanpa melakukan *treatment* apapun terhadap data. Oleh karenanya, data panel mungkin memberikan penyelesaian yang memuaskan.

Dalam analisis model data panel dikenal empat macam pendekatan estimasi yaitu:

1. Pendekatan Kuadrat terkecil (*Pooled Least Square/PLS*)

Pada pendekatan ini, estimasi model persamaan yang paling sederhana adalah mengabaikan dimensi *cross-section* dan *time series* dari data panel dan mengestimasi data dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk *pool*. Jadi, misalnya ada 33 data *cross section* dan 10 tahun periode waktunya, maka data tersebut disusun secara

berurutan, sehingga didapatkan 330 observasi untuk setiap variabel dalam model. Model PLS mengasumsikan bahwa nilai intercept adalah sama untuk setiap subyek. Model juga mengasumsikan bahwa slope koefisien juga identik untuk semua subyek. Dari sini nampak bahwa asumsi yang dipakai sangat ketat, sehingga walaupun metode PLS menawarkan kemudahan, model mungkin mendistorsi gambaran yang sesungguhnya dari hubungan antara Y dan X antar subyek.

2. Pendekatan Least Square Dummy Variable (LSDV) Model

Kesulitan terbesar dari pendekatan PLS adalah asumsi yang sangat ketat bahwa *intercept* dan *slope* dari persamaan regresi dianggap konstan baik antar subyek maupun antar waktu.

Sebuah cara untuk menunjukkan kekhasan unit *cross section* atau *time series* adalah memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk membolehkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik *cross section* maupun *time-series*.

Pendekatan yang paling sering terjadi adalah intercept bervariasi antar unit *cross-section* namun tetap mengasumsikan bahwa slope parameter adalah konstan antar unit *cross section*.

Pendekatan ini dikenal dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Pendekatan ini bisa ditulis dalam persamaan:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \quad \dots\dots\dots (1)$$

3. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model/FEM*)

Model LSDV digunakan jika sedikit unit *cross section*. Tetapi jika *cross section* besar maka penggunaan LSDV mengurangi *degrees of freedom* yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

Istilah *fixed effect* datang dari kenyataan bahwa meskipun *intercept* mungkin berbeda antar individu, namun *intercept* setiap individu tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu (*time*

invariant). Jika *intercept* ditulis sebagai α_{it} , berarti *intercept* setiap perusahaan adalah *time variant*. Selain itu FEM juga mengasumsikan bahwa koefisien dari regressor tidak bervariasi baik antar waktu maupun antar individu.

Ide dasar FEM dimulai dari persamaan (1):

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Nilai intercept untuk masing-masing unit cross section dapat ditulis:

$$\alpha_i = \alpha + \mu_i \quad i = 1, 2, \dots, N$$

dimana μ_i adalah *unobservable individual effect*. Persamaan (1) bisa juga ditulis:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_i + e_{it} \dots\dots\dots (3)$$

Dalam FEM, μ_i diasumsikan berkorelasi dengan regressor X atau μ_i tidak random.

4. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model/ REM*)

Perbedaan mendasar FEM dan REM adalah mengenai asumsi *unobservable individual effect* (μ_i). Jika di dalam FEM, μ_i diasumsikan berkorelasi dengan regressor (X), maka dalam REM, μ_i diasumsikan tidak berkorelasi dengan regressor X atau dengan kata lain μ_i diasumsikan bersifat random. Inilah ide dasar dari model REM.

Ide dasar REM dimulai dari persamaan berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it} \dots\dots\dots (4)$$

Error term sekarang adalah w_{it} yang terdiri dari u_i dan e_{it} . u_i adalah cross section (random) error componen, sedangkan e_{it} adalah combined component, sehingga REM sering disebut error component model (ECM). Persamaan (3) bisa dimodifikasi menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_i + e_{it} \dots\dots\dots (5)$$

Perbedaan mendasar antara persamaan (5) dan (3) adalah asumsi unobservable individual effects (u_i). REM menghasilkan estimator-estimator hasil estimasi yang lebih efisien (standar error yang lebih kecil atau t-stat yang lebih besar) dari pada FEM.

Pemilihan Metode Estimasi Dalam Panel Data

PLS vs FEM

Untuk menentukan model mana yang lebih baik antara PLS dan FEM maka digunakan *redundant fixed effect test*, jika signifikan yaitu probabilitas lebih kecil dari *level of significance* ($\alpha = 5\%$), maka lebih baik menolak H_0 dan menerima H_a yaitu model terbaik adalah FEM tetapi bila sebaliknya (tidak signifikan) maka lebih baik menggunakan PLS.

Secara formal, jika PLS dibandingkan dengan FEM: pada PLS menerapkan *intercept* yang sama untuk seluruh individu. Terkadang asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkannya setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda.

FEM vs REM

Untuk menentukan model mana yang lebih baik dalam melakukan estimasi antara FEM dan REM adalah pertama, terpulang pada asumsi yang dibuat tentang korelasi antara *cross section error component* μ_i dan regressor X. Jika diasumsikan bahwa μ_i dan regresor X adalah *uncorrelated* maka, REM lebih tepat digunakan dalam model. Akan tetapi jika diasumsikan bahwa μ_i dan regresor X adalah *correlated*, maka FEM lebih tepat. Untuk itu digunakan *correlated random effects – Hausman test*. Jika hasilnya signifikan, maka ada *correlated* artinya lebih baik menggunakan model FEM dan sebaliknya jika tidak signifikan maka lebih baik menggunakan REM.

Cara kedua, jawaban terpulang pada sampel dari penelitian. REM mengasumsikan bahwa μ_i diambil secara random dari populasi yang jauh lebih besar. Seringkali hal ini sulit dipenuhi. Misal, jika kita meneliti tingkat kriminalitas antar 50 negara bagian di AS, maka asumsi bahwa 50 negara bagian adalah sampel jelas tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, berarti REM tidak tepat untuk digunakan sebagai model.

Selain kedua prinsip di atas, ada beberapa pertimbangan teknis yang dapat dijadikan panduan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* yaitu:

- a. Bila T (jumlah unit time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross section) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh beda.
- b. Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda signifikan. Bila kita meyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian diambil secara acak maka REM harus digunakan. Tetapi bila kita meyakini bahwa unit cross section yang dipilih tidak diambil secara acak maka harus menggunakan FEM.
- c. Bila cross-section error component (ϵ_i) berkorelasi dengan variable bebas X maka parameter yang diperoleh dengan REM akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak bias.
- d. Bila N besar dan T kecil dan apabila asumsi yang mendasari REM dapat terpenuhi, maka REM lebih efisien dibanding FEM.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data pooling, dimana data *cross section* terdiri dari 34 provinsi di Indonesia yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Untuk data *time series* dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Ada 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya adalah derajat desentralisasi fiskal (DDF), modal, labor (tenaga kerja) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Data diolah dengan menggunakan software Eviews 9. Sumber data berasal dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Analisis dimulai dengan melakukan regresi atas data yang sudah terkumpul kemudian dipilih model yang terbaik dari tiga model yang tersedia yaitu model *Common Effect*, *model Fixed Effect* dan *Random Effect*.

A. Uji Model Terbaik

Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa dalam model *pooling data* ada tiga model yang bias digunakan untuk menganalisis yaitu model *common effect*, model *fixed effect* dan model *random effect*. Untuk menentukan model terbaik maka, ada dua langkah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sebelum menganalisis hubungan antara derajat desentralisasi fiskal dan variabel

lainnya terhadap variabel pertumbuhan ekonomi provinsi maka, pertama kali dilakukan regresi dengan menggunakan model *common effect* dan model *fixed effect*. Dari dua model tersebut ditentukan terlebih dahulu mana model yang terbaik untuk dipakai analisis. Untuk menentukan model terbaik dari dua model tersebut digunakan alat uji Chow Test (tabel 4.1). Jika nilai probabilitas *chy-square* lebih kecil dari pada *level of significance* yang telah ditentukan sebelumnya ($\alpha = 5\%$) maka, model yang terbaik adalah model *fixed effect*. Jika yang terjadi adalah kebalikannya maka, model yang terbaik dari dua model tersebut adalah model *common effect*.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	145.314631	(33,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	441.637931	33	0.0000

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari *cross-section Chi-square* lebih kecil dari 5 persen. Berdasar hasil tersebut maka, model terbaik di antara dua model (*common effect* dan *fixed effect*) adalah model *fixed effect*. Langkah selanjutnya menentukan model mana yang terbaik di antara model *fixed effect* dan *random effect*. Untuk menentukannya maka, dilakukan regresi dengan menggunakan *random effect*, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan *Correlated random effect - Hausman Test* (tabel 4.2). Jika nilai probabilitas *cross-section random* lebih kecil dibanding *level of significance* maka, model terbaik antara *fixed effect* dengan *random effect* adalah *fixed effect* dan sebaliknya bila nilai probabilitasnya lebih tinggi maka, model yang terbaik adalah model *random effect*.

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	107.329625	4	0.0000

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* dibawah 5 persen. Hal itu berarti bahwa model terbaik yang akan digunakan untuk dianalisis lebih lanjut antara *fixed effect* dengan *random effect* adalah model *fixed effect*. Model *fixed effect* pada dasarnya tetap berprinsip OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu (*cross-section*) dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya.

B. Pengujian Hipotesis

Berdasar penjelasan di atas, nampak bahwa model terbaik dari tiga alternative model dalam pooling data adalah model *fixed effect*. Oleh karrena itu untuk pengujian hipotesis maupun analisis lebih lanjut digunakan model *fixed effect*. Sebelum melakukan analisis hasil regresi lebih lanjut, langkah pertama adalah melakukan uji statistik baik secara individual (uji t) maupun secara bersama-sama (uji F) kemudian menentukan koefisien determinasi (*goodness of fit*).

Tabel 4.3
Hasil Regresi Model Fixed Effect

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/20/19 Time: 21:28
 Sample: 2015 2017
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 102

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7317.016	126795.9	0.057707	0.9542
DDF	158164.2	10354.06	15.27558	0.0000
MODAL	0.090563	0.042575	2.127123	0.0373
LABOR	0.015114	0.004500	3.358266	0.0013
IPM	1514.728	1913.587	0.791565	0.4315

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999597	Mean dependent var	279697.1
Adjusted R-squared	0.999364	S.D. dependent var	394203.4
S.E. of regression	9943.247	Akaike info criterion	21.52618
Sum squared resid	6.33E+09	Schwarz criterion	22.50411
Log likelihood	-1059.835	Hannan-Quinn criter.	21.92218
F-statistic	4288.731	Durbin-Watson stat	2.035710
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hipotesis yang digunakan adalah:

Ho: secara individual variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

Ha: secara individual variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

Besarnya *level of significance* (α) ditentukan sebesar 5 persen maka, jika nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih kecil dibanding nilai dari *level of significance* berarti tidak menolak Ha dan sebaliknya.

Berdasar tabel 4.3 menunjukkan bahwa secara umum derajat desentralisasi fiskal 34 provinsi di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi) karena probabilitasnya lebih kecil dibanding *level of significance* (α) yang telah ditentukan sebelumnya dan hubungan antara keduanya adalah positif, dengan koefisien sebesar 158.164,2. Hal ini berarti bahwa jika derajat desentralisasi fiskal suatu provinsi di Indonesia meningkat sebesar satu point maka PDRB provinsi tersebut akan meningkat sebesar Rp 158.164,2 milyar dan sebaliknya jika derajat desentralisasi fiskal menurun sebesar satu point maka akan menurunkan PDRB provinsi tersebut sebesar Rp 158.164,2 milyar.

Untuk variabel modal juga menunjukkan hal yang sama yaitu modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi) dengan nilai koefisiennya sebesar 0,090563. Artinya, jika modal provinsi meningkat sebesar Rp 10 milyar maka, maka PDRB provinsi tersebut akan meningkat pula sebesar Rp 0,90563 milyar.

Variabel bebas lainnya adalah labor (angkatan kerja yang bekerja). Berdasar hasil olah data menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan koefisiennya sebesar 0,015114. Hal itu berarti bahwa jika jumlah tenaga kerja yang bekerja meningkat sebesar 10 tenaga kerja maka akan meningkatkan PDRB provinsi tersebut sebesar Rp 0,15114 milyar.

Variable keempat atau terakhir adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang mengukur umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita (BPS). Hasil regresi menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena probabilitasnya (0,4315) lebih besar dari pada *level of significance* (0,05) yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk uji F statistik (tabel 4.3) menunjukkan bahwa probabilitas dari F statistik (0,0000) lebih kecil dibanding dengan besarnya *level of significance* (0,05). Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel derajat desentralisasi fiskal, modal, jumlah tenaga kerja yang bekerja dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasar tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa nilai *goodness of fit* atau besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,999597 atau 99,9597 persen. Hal ini berarti bahwa total variasi dari pertumbuhan ekonomi provinsi mampu dijelaskan oleh model sebesar 99,9597. Kemampuan model yang digunakan pada penelitian ini dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.

C. Hasil dan Analisis

Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diharapkan oleh setiap negara maupun daerah. Adanya pertumbuhan yang tinggi diharapkan daya serap terhadap angkatan kerja semakin tinggi sehingga pengangguran akan semakin menurun. Menurunnya pengangguran akan menurunkan tingkat kemiskinan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk merubah sistem ekonomi dari tersentralisasi menjadi terdesentralisasi sejak tahun 2001. Desentralisasi diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di daerah melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan adalah positif signifikan. Hal itu berarti bahwa meningkatnya derajat desentralisasi fiskal, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah akan memberikan jasa publik

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Efisiensi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah bertambah cepat.

Implikasi dari temuan tersebut adalah, jika pemerintah daerah menginginkan pertumbuhan ekonomi daerah tinggi maka, kebijakan desentralisasi harus betul-betul ditegakkan sehingga kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai, karena tujuan dari kebijakan desentralisasi adalah memenuhi aspirasi daerah terkait penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik disetiap daerah (Simanjuntak,2002).

Variabel bebas lainnya yaitu modal menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Hal ini berarti bahwa jika pemerintah daerah menginginkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka, pembentukan modal bruto daerah juga harus ditingkatkan baik itu modal yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh non pemerintah. Peningkatan modal akan meningkatkan kemampuan investasi daerah. Meningkatnya investasi berarti semakin banyak lapangan pekerjaan yang akan tersedia sehingga daya serap terhadap angkatan kerja yang ada akan semakin besar. Dengan demikian pengangguran akan semakin menurun, kemiskinan semakin menurun, ketimpangan antar daerah akan semakin mengecil sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Implikasi dari temuan tersebut adalah, jika pemerintah daerah menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka, pemerintah daerah harus terus menerus mendorong peningkatan modal bruto baik oleh pemerintah sendiri maupun sektor swasta. Berbagai kemudahan dalam melakukan investasi harus diberikan oleh pemerintah daerah, termasuk kebijakan pelayanan satu atap dengan waktu yang semakin singkat dalam mengurus perijinan tanpa pungutan yang tidak jelas. Jika hal

tersebut betul-betul terjadi maka, akan membuat investor nyaman berinvestasi di Indonesia, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Variabel jumlah tenaga kerja yang bekerja juga menunjukkan hasil yang positif signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah menginginkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka jumlah tenaga kerja yang bekerja harus ditingkatkan. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Peningkatan jumlah output yang dihasilkan berarti akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi jika tenaga kerja tersebut betul-betul berkualitas maka, akan semakin mempercepat peningkatan output yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka jumlah tenaga kerja yang terdidik dan terampil harus banyak tersedia. Untuk menyediakan tenaga kerja yang terdidik dan terampil maka, pemerintah daerah harus mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran pentingnya pendidikan di samping juga kebijakan wajib belajar semakin di naikan lama belajarnya, termasuk juga kualitas pendidikan harus segera dibenahi. Salah satu sumber dari kelemahan dari SDM Indonesia adalah faktor dunia pendidikan yang memprihatinkan. Jika hal tersebut bisa segera dibenahi maka, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa diharapkan akan terjadi.

Variabel IPM (Indeks pembangunan Manusia) yang pengukurannya memasukkan unsur-unsur umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita ternyata tidak signifikan. Hal itu bisa terjadi kemungkinan karena rata-rata lama sekolah di Indonesia terbilang masih rendah, sekitar 8 tahun, berarti SMP saja belum lulus. Jika SMP saja tidak lulus maka, kemungkinan untuk mendapat pekerjaan yang pantas, akan kecil sekali. Di samping itu dalam komponen IPM juga terdapat pengeluaran per kapita dimana per bulan

pengeluaran per orang di bawah satu juta per bulan. Pengeluaran dibawah satu juta per bulan adalah kecil. Ditambah lagi dengan adanya masyarakat ekonomi Asean (MEA), dimana halangan untuk memasuki pasar dihilangkan, persaingan antar tenaga kerja menjadi semakin ketat. Kemungkinan hal itulah yang membuat IPM di daerah tidak signifikan.

Jika pemerintah daerah menginginkan IPM signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan maka, pemerintah daerah harus mendorong kesadaran masyarakat untuk meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya dengan membuat peraturan wajib belajar 12 tahun misalnya. Tetapi konsekuensinya, pemerintah harus menyediakan sekolah gratis atau beasiswa harus diberikan pada masyarakat yang tidak mampu. Jika hal itu bisa dilakukan, diharapkan indeks pembangunan manusia akan semakin tinggi. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat, sehingga daya saing pekerja juga akan semakin meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Desentralisasi yang ditunjukkan dalam bentuk DDF (derajat desentralisasi fiskal) menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa kemandirian dalam pengeluaran fiskal akan mendorong pertumbuhan provinsi yang bersangkutan.

Variabel lain yaitu modal, dan jumlah angkatan yang bekerja juga menunjukkan hasil yang positif signifikan. Hal ini berarti bahwa jika pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka, jumlah modal yang diinvestasikan dan jumlah tenaga kerja yang bekerja harus terus ditingkatkan.

B. Saran

Perlunya ditelusur lebih dalam tentang provinsi-provinsi mana saja yang DDFnya tidak signifikan sehingga bisa diberikan masukan kepada daerah tersebut mengapa kemandirian dalam pengeluaran fiskal tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. dan Megantara. 2009. *EraBaru Kebijakan Fiskal: Pemikiran Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Achmad Sobari. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Di Indonesia, Tesis.
- Aisyah, R. 2008. The Effect of Fiscal Decentralization on Economic Growth, *International Institute Social Studies*. The Netherlands.
- Akai, Nabuo dan Masayo Sakata. 2000. *Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence From State – Level Cross – Sectoral Data For The United State*. CIRJE Discussion Papers.
- Akai, Nabuo dan Masayo Sakata. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State – Level Cross Section Data for The United State. *Journal of Urban Economics* 52, pp. 93-108.
- Bahl, R. 1998. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, Washington D.C.: The World Bank Institute.
- Bird, R. Dan Francois V. 2000. *Desentralisasi Fiskal Di Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Davoodi H. dan Zhou HF. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross – Country Study. *Journal of Urban Economics* 43: 244-257.
- Dwi Muslianti. 2011. Dampak Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Desentralisasi Fiskal. Tesis.
- Halim, A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Hendri. 2015. Fiscal Decentralization and Regional Economics Growth In Sumater, Indonesia. *International Institute of Social Studies*.
- Mangkusubroto G. 1997. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: BPF.
- Musgravw, R. A. dan B. M. Peggy. 2011. *Public Finance In Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Muslianti. 2011. *Dampak Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Pada Masa Desentralisasi Fiskal*. Tesis. Bogor: IPB.

- Nelson, M. A. 1986. *An empirical Analysis of State and Local Tax Structure in The Context of The Leviathan Model of Government Public Choice* 49: 283-294.
- Nurhemi dan Guruh Suryani R. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 18 No. 2 Oktober 2015*.
- Oates W. E. 1993. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jraovich.
- Oates W. E. 1993. Fiscal Decentralization And Economic Development. *National Tax Journal*. 2 (46).
- Sobari, Achmad. 2011. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Di Indonesia*. Tesis. Bogor: IPB.
- Solow, Robert M. 1996. A Contribution to The Theory Of Economic Growth. *Quarterly Journal of economics*
- Stiglitz, Je. 2000. *Economics of The Public Sector*. Third Edition. New York: w.w. Norton & Company.
- Tanzi, V. 2002. *Pitfall on The Roads to Fiscal Decentralization: Managing Fiscal Decentralization*. London:Routledge.
- Todaro, MP dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 9. Alih Bahasa. Jakarta: Erlangga.
- Zhang T. dan Zhou, HF. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics*. 69: 221-240.